PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Jumat Tanggal: 17 Maret 2017 Halaman: 13

Rp915 Juta untuk Kendaraan Operasional Dewan

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) menganggarkan Rp 915 juta untuk pembelian kendaraan operasional. Anggaran kurang dari Rp1 miliar ini ditujukan untuk membeli tiga kendaraan operasional DPRD Kota Yogyakarta. Anggaran kendaraan ini hanya ditujukan untuk legislatif karena adanya pemangkasan anggaran di APBD 2017.

Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya, Andi Sasongko menjelaskan, pihaknya baru menganggarkan tiga unit kendaraan untuk sekretariat DPRD setempat. Sementara, untuk kalangan eksekutif, hingga kini belum dialokasikan anggaran untuk pembelian kendaraan dinas maupun operasional.

"Seluruh unit kendaraan ini akan kami tujukan untuk memfasilitasi kegiatan di dewan. Total anggarannya sebesar Rp915 juta," ujar Andi, Kamis (16/3).

Sementara, pihaknya juga menyebutkan adanya pemangkasan APBD 2017 membuat rencana pembelian mobil dinas untuk pejabat dibatalkan. Pihaknya mencatat ada dekitar delapan mobil dinas yang belum bisa dipenuhi.

Delapan pelaksana tugas (plt) kepala dinas yang belum bisa mendapatkan fasilitas kendaraan dinas ini di antaranya adalah Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian, Dinas Kebakaran, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Dinas Pariwisata, dan lainnya. Sementara itu, ada dua instansi yang belum memiliki kendaraan dinas jabatan sebelum dibentuknya organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Rumah Sakit Yogya dan Satpol PP.

Hal tersebut, ujar Andi, tak lain karena alokasi belanja dalam pembahasan APBD 2017 mendapat sorotan dari Gubernur DIY.

● ke halaman 14

Rp915 Juta untuk Kendaraan

● Sambungan Hal 13

Sehingga OPD yang baru terbentuk pada 1 Januari 2017 itu, harus memanfaatkan kendaraan dinas yang ada.

Pihak Pemkot Yogya juga belum bisa memenuhi permintaan kendaraan operasional berupa mobil pikap untuk menambal jalan rusak. Hanya saja, pihaknya meminta dinas terkait untuk memaksimalkan kendaraan yang masih ada.

"Perawatannya harus dimaksimalkan untuk tahun ini. Kalau memang rusaknya cukup parah dan tidak bisa diperbaiki, lebih baik nantinya dikandangkan terlebih dahulu sebelum nantinya dihapuskan," ulas Andi.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta, Prima Hastawan mengatakan, tiga unit kendaraan dinas yang diberikan itu berupa satu unit minibus ukuran besar dan dua unit minibus ukuran sedang.

Nantinya, satu unit kendaraan minibus besar ini akan dipergunakan untuk keperluan kunjungan kerja dalam lingkup DIY.

"Dua minibus sedang nantinya akan dipergunakan untuk operasional Badan Kehormatan dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah," jelasnya. **(ais)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005